Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

DPRD Tolak Usul Anies Untuk Revisi Rencana Pembangunan

Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 paling lambat bulan depan.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menilai permintaan pemerintah DKI untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 kurang tepat. Sebab, revisi peraturan daerah itu tidak masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan tidak ada urgensinya bagi Dewan untuk membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 saat ini. "Tidak ada alasan mendesak untuk mengubah RPJMD," kata Pantas, kemarin. "Apalagi revisi Perda RPJMD tidak masuk propemperda tahun ini."

Gubernur Anies Baswedan mengirim surat permohonan revisi Peraturan Daerah tentang RPJMD 2017-2022 kepada Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada 29 Juni lalu. Surat itu menyebutkan pemerintah menargetkan revisi Peraturan Daerah No 1/2018 paling lambat bulan depan.

Adapun pada tahun ini terdapat 26 rancangan peraturan daerah yang disepakati untuk dibahas oleh Dewan dan eksekutif. Sedangkan rancangan perubahan Peraturan Daerah No 1/2018 tidak masuk dalam Propemperda 2020.

Pantas memilih menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah yang masuk propemperda. "Perubahan RPJMD ini tidak masuk kategori mendesak," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Jakarta, Mujiyono, menilai perubahan RPJMD masih dimungkinkan. Apalagi terjadi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2020 yang signifikan akibat pandemi *corona*.

Data Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta menyebutkan APBD DKI diproyeksikan turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun karena pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah DKI mengurangi sejumlah belanja, antara lain belanja langsung berupa tanah, konstruksi, dan gedung dari Rp 18,04 triliun menjadi Rp 0,1 triliun. Anggaran belanja yang tersisa disiapkan hanya untuk penanggulangan banjir.

Mujiyono menjelaskan, target dan sasaran pembangunan yang tertunda ini harus disesuaikan lagi dan menjadi prioritas pada tahun depan. Selain itu, ia mengingatkan agar perubahan RPJMD tidak mengakomodasi program baru, seperti penyelenggaraan balap mobil listrik internasional atau Formula E. "Jakarta E-Prix tidak memiliki kajian yang memadai dan terkesan terlalu dipaksakan pelaksanaannya," kata politikus Demokrat itu.

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Amin Subekti irit berkomentar ihwal rencana perubahan RPJMD itu. "Tanya sama timnya (pelaksana perubahan RPJMD) saja," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono belum memberi penjelasan ihwal rencana perubahan RPJMD itu. Pertanyaan dan telepon *Tempo* tidak kunjung dibalasnya hingga tenggat tulisan. Adapun saat didatangi ke kantornya, ia tidak bersedia ditemui.

● GANGSAR PARIKESIT